

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA KOTA GUNUNG SITOLI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



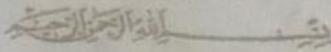
UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : RAIS HALIM HAREFA
NPM : 1705170058
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : RAIS HALIM HAREFA
 NPM : 1705170058
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA GUNUNG SITOLI

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)

(FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., aCP)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

c. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CPA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RAIS HALIM HAREFA
N.P.M : 1705170058
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA
GUNUNG SITOLI

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2024

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

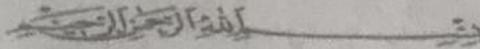
(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMA)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rais Halim Harefa
NPM : 1705170058
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang masalah		AS
Bab 2	teori ditambah		AS
Bab 3	Metode - pemilihan di publikasi		AS
Bab 4	populasi & sampel	6/3-2024	AS
Bab 5	kesimpulan & saran		AS
Daftar Pustaka	list keadisa kemau bukan / unyuhon pedoman		AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	selesai bimbingan	7/3-2024	AS

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, Maret 2024
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.S



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAIS HALIM HAREFA
N.P.M : 1705170058
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA GUNUNG SITOLI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



RAIS HALIM HAREFA

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA GUNUNG SITOLI

**RAIS HALIM HAREFA
NPM. 1705170058**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: raishalim01@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Gunung Sitoli. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pada Kota Gunung Sitoli berjumlah 41 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh berjumlah 41 orang Pada Kota Gunung Sitoli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kota Gunung Sitoli

Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON THE QUALITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTS IN GUNUNG SITOLI CITYI

**RAIS HALIM HAREFA
NPM. 1705170058**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email: raishalim01@gmail.com

The purpose of this research is to test and analyze the influence of the implementation of the Regional Financial Accounting System and Regional Financial Management on the Quality of Financial Reports in the City of Gunung Sitoli. The approach used in this research is an associative approach. The population in this study was 41 people in Gunung Sitoli City. The sample in this study used saturated sampling totaling 41 people in Gunung Sitoli City. Data collection techniques in this research used observation techniques and questionnaires. The data analysis technique in this research uses a quantitative approach using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program. The results of this research prove that the implementation of the Regional Financial Accounting System has an effect on the Quality of Financial Reports. Implementation of the Regional Financial Accounting System and Regional Financial Management influences the Quality of Financial Reports in Gunung Sitoli City

Keywords: Implementation of Regional Financial Accounting Systems, Regional Financial Management and Quality of Financial Reports

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli”**

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pengelolaan Keuangan Daerah Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta **Afdhalddin Harefa** dan Ibunda **Zamalia Zebua** tercinta yang selalu memberikan do’a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih Pengelolaan Keuangan Daerah yang layak hingga bangku perkuliahan

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah seleyaknya segala keindahan hati

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr Januri, SE,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si** selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc Prof Dr. Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi
6. Bapak **Riva Ubar, S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih juga saya ucapakan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih juga saya ucapakan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena

kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin Ya Rabbal'alam

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2024
Penulis

RAIS HALIM HAREFA
NPM 1705170058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teoritis	10
2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	10
2.1.1.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah	10
2.1.1.2. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Daerah	11
2.1.1.3. Komponen Kualitas Laporan Keuangan Daerah	13
2.1.1.4. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah	15
2.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	16
2.1.2.1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	17
2.1.2.2. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	18
2.1.2.3. Prosedur Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	18
2.1.2.4. Tahapan Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	20
2.1.2.3. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	20
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah	22
2.1.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	22
2.1.3.2. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual	26
2.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	26
2.3.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	26
2.3.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	27
2.4 Hipotesis	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	32
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2 Definisi Oprasional	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	34

3.4 Populasi dan Sampel	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB 4 HASIL PENELITIAN	45
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian	45
4.1.2 Identitas Responden	45
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian	47
4.1.4 Uji Asumsi	55
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	59
4.1.6 Pengujian Hipotesis	61
4.2. Pembahasan	66
BAB 5 PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Gunung Sitoli	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Indikator Variabel	33
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	35
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	37
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	45
Tabel 4.2 Umur responden	46
Tabel 4.3 Tingkatan Pendidikan Responden	46
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden	47
Tabel 4.5 Skor Angket Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.6 Skor Angket Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	50
Tabel 4.7 Skor Angket Pengelolaan Keuangan Daerah.....	52
Tabel 4.8 Uji Validitas	53
Tabel 4.9 Uji Realibilitas	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokeralasi.....	59
Tabel 4.12 Hasil Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4.13 Uji Secara Parsial (Uji-t).....	62
Tabel 4.14 Uji Secara Simultan (Uji F)	64
Tabel 4.15. Uji Koefisien Determinasi (R)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 3.1 Uji T	42
Gambar 3.2 Uji F	43
Gambar. 4.1 Uji Normalitas P Plot`	56
Gambar. 4.2 Uji Heteroskedastisitas`	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Fenomena yang menjadi sorotan utama saat ini pada organisasi sektor publik di Indonesia adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk laporan keuangan (Yeni et al., 2020).

Salah satu alat untuk melihat hasil kegiatan keuangan daerah yaitu melihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Andriani et al., 2019). Kualitas laporan keuangan adalah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh entitas pelaporan (Fahmi, 2019)

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Putri et al., 2018).

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*) (Mokoginta et al., 2017).

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan sebagai cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Slamet & Irmadiani, 2022)

Laporan keuangan yang baik pula harus sesuai dengan standar. Standar dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mana merupakan sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya banyak pemerintahan yang belum paham mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan juga standar akuntansi pemerintahan tersebut (Prasetyaningrum, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai

dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 21 Tahun 2011). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Kepmendagri No. 64 Tahun 2013). Selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Saragih, 2017)

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diberi batasan-batasan yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan dan ditujukan kepada siapa sehingga diharapkan dengan memahami aturan ini

para pelaksana pengawasan keuangan daerah terutama tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan (Sinambela et al., 2018)

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunaanya (Gea, 2021).

Berikut data laporan realisasi anggaran belanja daerah Kota Gunung Sitoli

**Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Kota Gunung Sitoli (dalam Rupiah)**

Tahun	Belanja		Tingkat Efektifitas
	Anggaran	Realisasi	
2021	719.572.906.377	645.843.920.547	89,75 %
2022	724.364.631.368	710.592.230.742	98,09%
2023	734.323.192.000	483.101.777.650	65,78 %

Sumber : <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari realisasi pendapatan tahun 2020-2022 tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2021 anggaran belanja sebesar 719.572.906.377 sementara realisasi sebesar 645.843.920.547 dan tingkat efektifitas sebesar 89,75 % dan termasuk pada

tingkat cukup efektif, kemudian tahun 2022 anggaran belanja 724.364.631.368 namun realisasi sebesar 710.592.230.742 dan tingkat efektifitas sebesar 98,09% dan termasuk pada tingkat kurang efektif, dan pada tahun 2022 anggaran belanja sebesar 734.323.192.000 namun realisasi sebesar 483.101.777.650 dan tingkat efektifitas sebesar 65,78 % dan termasuk pada tingkat kurang efektif.

Dari penjelasan di atas, tingkat efektifitas dinyatakan sebagai kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (*idle money*). Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017)

Penyusunan anggaran ini memberikan suatu dasar untuk mencapai sasaran pada hampir semua reformasi bagian publik dan meningkatkan pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjaga penyusunan perencanaan pelayanan publik yang baik. Prinsip penyusunan perencanaan adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip penyusunan anggaran terutama berkaitan erat dengan

pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu (Manik et al., 2022)

Anggaran adalah salah satu komponen penting dalam perencanaan, yang berisikan rencana kegiatan di masa mendatang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya (Nainggolan, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah yang lemah dimana laporan keuangan yang disajikan tidak mampu di tampilkan secara utuh di website Kota Gunung Sitoli.
2. Anggaran yang tidak mampu menggunakan anggaran secara keseluruhan
3. Pengelolaan keuangan yang belum mampu dilakukan secara utuh

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli?
2. Apakah ada Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli?
3. Apakah ada Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli
 - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
 - b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam PP No.71 Tahun 2010, PSAP No. 1 Paragraf 9 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Sedangkan menurut PP No. 8 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan negara/daerah selama satu periode.

Menurut (Hanum, 2020) Laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi keuangan yang disajikan suatu entitas telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dengan memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan

Menurut (Utami et al., 2020) Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu

Menurut (Kartikahadi et al., 2020) Laporan keuangan merupakan penyajian yang sistematis tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Laporan keuangan adalah Informasi akuntansi yang terutama ditujukan kepada pihak ekstern suatu perusahaan atau organisasi (Mardiasmo, 2019).

Menurut (Siahaan & Simanjuntak, 2020) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka Laporan Keuangan Daerah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

2.1.1.2 Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan penilaian pada LKPD setiap tahunnya berupa opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara ada 4 macam opini yang diberikan BPK atas LKPD , yaitu :

1. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Diberikan dengan kriteria :

- a. Sistem pengendalian internal memadai.
- b. Tidak ada salah saji yang material atas pos – pos laporan keuangan.
- c. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

2. WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Diberikan dengan kriteria :

- a. Sistem pengendalian internal memadai.
- b. Namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memerhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

3. TW (Tidak Wajar)

Diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

4. TMP (Tidak Memberikan Pendapat)

Diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

2.1.1.3 Komponen Kualitas Laporan Keuangan Daerah

LKPD terdiri atas komponen LKPD dan setiap komponen LKPD tersusun atas pos-pos LKPD. Komponen dan pos-pos LKPD dibedakan menurut basis

akuntansi yang diterapkan. Perbedaan komponen LKPD menurut basis akuntansi yang diterapkan sebagai berikut :

1. Komponen LKPD Berbasis Kas
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
2. Komponen LKPD Berbasis Akrua
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
 - c. Laporan Operasional (LO)
 - d. Neraca
 - e. Laporan Arus Kas (LAK)
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dimana Pos-pos/unsur dalam satu komponen LKPD ialah bagian yang membentuk suatu komponen LKPD. Pos-pos/unsur dalam LKPD menurut PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. PP No. 24 Tahun 2004
 - a. Pos-pos LRA Sebagai berikut : pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan,
 - b. Pos-pos LPASL, Tidak dijelaskan

- c. Pos-pos Neraca meliputi : aset, kewajiban dan ekuitas, selanjutnya masing-masing unsur diklasifikasikan lebih lanjut kedalam unsur yang lebih rinci
 - d. Pos-pos LO, Tidak dijelaskan
 - e. Pos-Pos LAK meliputi : penerimaan kas dan pengeluaran kas f. Pos-pos LPE, tidak dijelaskan.
2. PP No. 71 Tahun 2010
- a. Pos-pos LRA sebagai berikut: Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
 - b. Pos-pos Laporan Perubahan SAL sebagai berikut: SAL awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, SAL Akhir.
 - c. Pos-pos neraca meliputi unsur-unsur yang tidak berbeda dengan PP lama.
 - d. Pos-pos LO meliputi unsur-unsur: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos luar biasa.
 - e. Pos-pos LAK mencakup unsur-unsur yang tidak berbeda dengan PP lama.
 - f. Pos-pos LPE mencakup unsur-unsur: ekuitas awal, Surplus/defisitLO pada periode bersangkutan, koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir

2.1.1.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

2.1.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Akuntansi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan akurat, yang bertujuan untuk sebagai bahan laporan kepada investor, pemerintah dan dinas perpajakan di suatu negara. Dari 524 pemerintah daerah, sebanyak 361 pemerintahan daerah atau 68.89% telah menggunakan sistem informasi keuangan, dan 163 pemerintah daerah (31.11%) belum menggunakan sistem informasi keuangan. Data pada bulan oktober 2012 tentang laporan keuangan daerah, sebanyak 223 pemerintah daerah menggunakan sistem informasi manajemen, 123 pemerintah daerah menggunakan sistem yang berbeda dan 110 daerah yang belum menggunakan sistem informasi manajemen. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas daerah di Indonesia telah menjadikan sistem informasi keuangan daerah sebagai hal yang paling penting untuk terus dilaksanakan agar menciptakan laporan keuangan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel

Menurut (Utami et al., 2020) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ialah kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahapan, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan serta mencatat data financial.

Menurut (Rasdianto, 2019) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah : “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
2. Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.1.2.3. Prosedur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup :

- a. Surat Tanda Bukti Pembayaran

- b. Surat Tanda Setoran (STS)
- c. Bukti Transfer
- d. Nota Kredit Bank.
- e. Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan :
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
 - 2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
 - 3) Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur pengeluaran kas meliputi

- a. Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung
- b. Sub Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas

3. Prosedur Akuntansi Aset.

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang

digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a. Berita Acara Penerimaan Barang
 - b. Surat Keputusan Penghapusan Barang
 - c. Surat Keputusan Mutasi Barang
 - d. Berita Acara Pemusnahan Barang
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang
 - f. Berita Acara Penilaian
 - g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4. **Prosedur Akuntansi Selain Kas.** Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas mencakup :
- a. Koreksi Kesalahan Pembukuan
 - b. Penyesuaian Terhadap Akun Tertentu Dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Pada Akhir Tahun
 - c. Reklasifikasi Belanja Modal Menjadi Aset Tetap
 - d. Reklasifikasi Akibat Koreksi Yang Ditemukan Dikemudian Hari.

2.1.2.4. Tahapan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi Prosedur.

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait.

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait.

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumendokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar.

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya Dalam Langkah Teknis.

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihakpihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen

apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara (Sistem Akuntansi Pemerintahan) dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan tersebut ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk lebih melengkapi sistem. Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-undang nomor 15

tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efisien dan efektif. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah (Halim, 2017:330).

Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus, Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah Abdul Halim (2008:9). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala

daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsi- prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2021) antara lain:

1. **Transparansi**

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat

2. **Akuntabilitas**

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. **Value of money**

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Permata et al., 2022)	Pengaruh Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating	Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah , akuntabilitas dan pengawasan anggaran secara keseluruhan berpengaruh positif signifikan terhadap daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
2	(Yassir et al., 2022)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan	Bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang
3	(Erganda et al., 2021)	Pengaruh Trasparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	Pengelolaan Keuangan Daerah dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan Laporan Keuangan Daerah
4	(Saragih & Parlina, 2021)	Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Bandar Klippa dapat dilihat dari proses penganggaran dana desa yang dilakukan perangkat desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perangkat Desa Bandar Klippa
5	(Putri, 2018)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas, Pengawasan Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa	Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya keterbukaan informasi pada masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat

		Majenang Sukodono Sragen)	memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen tersebut
--	--	---------------------------	--

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Ikyarti & Aprilia, 2019)

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar ini syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yakni SAP yang diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, standar akuntansi keuangan ini merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Rahmawati et al., 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yeni et al., 2020), (Tarigan & Sari, 2021) dan (Gustina, 2021) bahwa penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.3.2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan menggunakan 7 (tujuh) komponen dasar, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Sinambela et al., 2018)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana hal-hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional (Vidyasari & Suryono, 2021).

Peraturan Menteri Daerah dalam Negeri/Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan baik secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi mempunyai peran penting karena berfungsi dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memiliki kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Husna et al., 2022).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Defitri, 2018) dan (Husna et al., 2022) bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

2.3.3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah hal yang sensitif dan cukup menarik untuk dibahas pada saat ini, dikarenakan sudah cukup banyak kerugian yang dialami oleh perusahaan swasta maupun pemerintah karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan terkait (Mahfuz & Hanum, 2023)

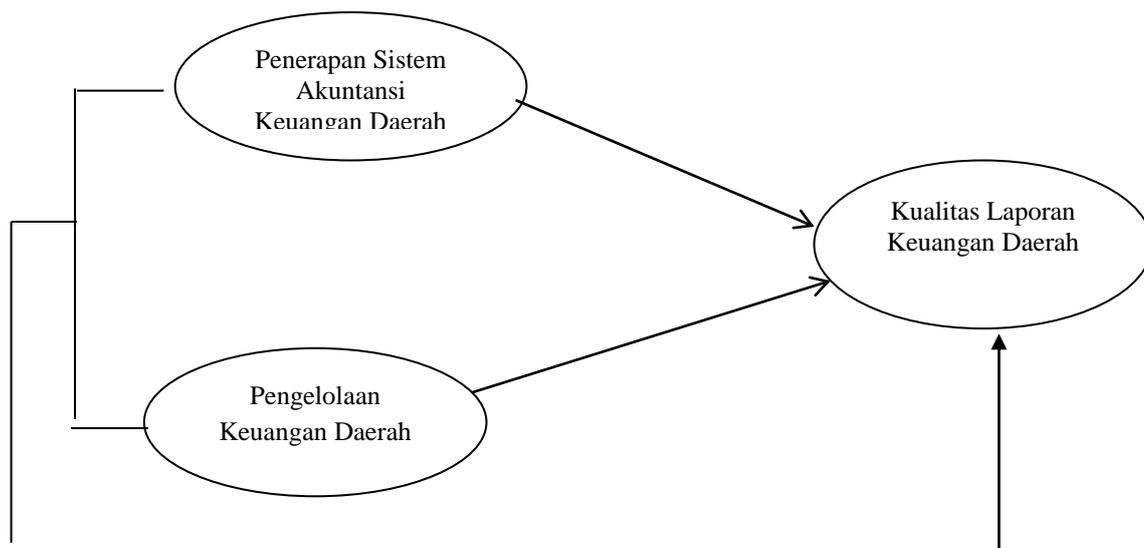
Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja

tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Sinambela et al., 2018)

Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaaan dana (Slamet & Irmadiani, 2022)

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Slamet & Irmadiani, 2022) dan (Ikyarti & Aprilia, 2019) bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendrayani, 2015)

1. Ada pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli.
2. Ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli

3. Ada pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Kota Gunung Sitoli.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian data yang dikumpulkan dalam bentuk kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian di mana pemaknaan fenomena atau variabel yang diteliti didasarkan kepada ukuran-ukuran kuantitatif variabel seperti angket, tes dan pengamatan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan objek dalam sebuah penelitian yang akan berubah apabila dalam variabel independen berubah. Pasalnya variabel ini bergantung pada variabel independen, sehingga variabel dependen tidak akan hadir apabila tidak ada variabel independen (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini yakni Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel ini dapat mengubah pengaruh yang diukur oleh peneliti dalam mencari tahu hal yang sedang diamati. Variabel independen sendiri merupakan

bentuk variabel yang mampu memberikan pengaruh perubahan terhadap perubahan dependen. Bisa dikatakan bahwa variabel independen merupakan penyebab dari perubahan pada variabel dependen. Apabila variabel independen diubah, maka variabel dependen juga ikut diubah (Sugiyono, 2019).

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai (X_2),

Tabel 3.1.
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ialah kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahapan, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan serta mencatat data financial. (Utami et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Prosedur 2. Menentukan Pihak Pihak Terkait 3. Menentukan Dokumen Terkait 4. Menentukan Jurnal Standar 5. Menuangkannya dalam langkah teknis 	Likert
Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2)	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Value Of Money 	Likert

	pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah		
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Siahaan & Simanjuntak, 2020)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Gunung Sitoli.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2023 dan Tahun 2024																							
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Prariset Penelitian	■	■	■	■																				
3	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■													
4	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	■							
5	Seminar Skripsi																		■						
6	Revisi Skripsi																			■					
7	Penyusunan Skripsi																			■					
8	Bimbingan Skripsi																			■					
9	Sidang Meja Hijau																			■					

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Kota Gunung Sitoli sebanyak 41 orang

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari

populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah semua Kota Gunung Sitoli. yang berjumlah 41 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* (total sampling). *Sampling jenuh* adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi kurang dari 100 (Suryani & Hendrayani, 2015). Mengingat jumlah populasi hanya sebesar 41 pegawai, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yaitu tanya jawab secara langsung kepada pegawai mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian yang sifatnya tidak struktur.

2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi dinas, Dokumen ini diperlukan untuk menyempurnakan/mendukung pembahasan di dalam penelitian ini dengan cara mempelajarinya.

3. Daftar Pertanyaan (*Quesioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu Kota Gunung Sitoli..

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Pengukuran

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Sugiyono, 2019)

Dimana :

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$ = Jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$ = Jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable x

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variable y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali variable x dan y

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu software *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 24. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kuisioner yang disebarakan.

3.6.1 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah

a : Nilai Konstanta Y bila $X_1, X_2, X_3 = 0$

X_1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_2 : Pengelolaan Keuangan Daerah

Metode regresi merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak bias yang terbaik (best linier unbiased estimate). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan uji asumsi klasik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Juliandi et al., 2018). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflasi Factor*) antara variabel independen dan nilai *tolerance*. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

c) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variable independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterokedastisitas adalah:

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auto korelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W).

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini merupakan untuk membuat keputusan sementara untuk melakukan penyanggahan dan pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai bahan untuk menetapkan kesimpulan tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Adapun pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel kepemimpinan dan variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja Pegawai digunakan uji t dengan rumus:

Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed $<$ taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 diterima.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019)

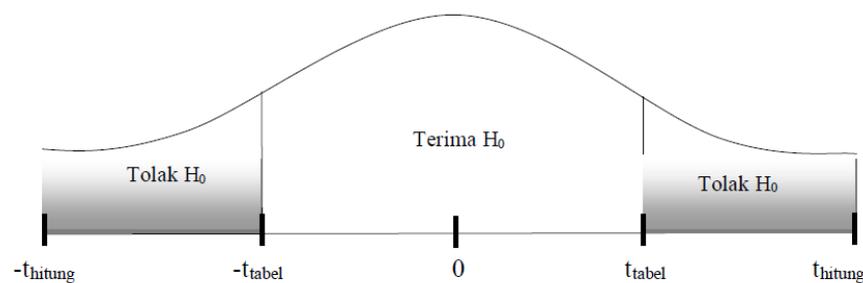
Dimana :

- t : nilai t hitung
 r : koefisien korelasi
 n : jumlah sampel

1. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 diterima.
2. Sedangkan jika nilai t dengan probabilitas t dengan korelasi yakni Sig-2 tailed > taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 ditolak.

Hipotesis

1. $H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
2. $H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).



Gambar 3.1 : Kriteria Pengujian Hipotesis t

b. Uji F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui signifikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serempak digunakan uji F dengan rumus :

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber :(Sugiyono, 2019)

Dimana:

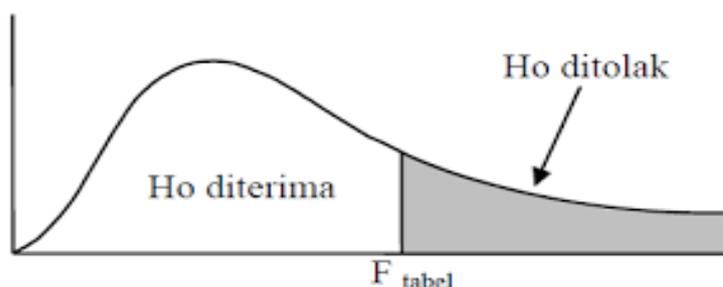
R^2 = Koefisien Korelasi Ganda

n = Jumlah Variabel

F = F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel}

Ketentuan:

- Bila $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $-f_{hitung} < -f_{tabel}$, maka H_0 ditolak karena adanya korelasi yang signifikan antara variabel X_1 dan X_2 dengan Y.
- Bila $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ dan $-f_{hitung} \geq -f_{tabel}$, maka H_0 diterima karena tidak adanya korelasi yang signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y.



Gambar 3.2 :Kriteria Pengujian Hipotesis F

3.6.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 24.0). hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2019)

Dimana:

- | | |
|-------|---------------------------|
| D | : Koefisien determinasi |
| R | : Nilai Korelasi Berganda |
| 100 % | : Persentase Kontribusi |

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Variabel Data

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), 10 pernyataan untuk Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), dan 6 pernyataan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (X2). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 41 orang responden pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

4.1.2 Identitas Responden

4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	26	63,41 %
2	Perempuan	15	36,59 %
TOTAL		41	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 26 (63,41%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 15 (36,59%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki laki pada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli.

4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 Tahun	11	26,83 %
2	31 – 40 Tahun	14	34,15 %
3	41 - 50 Tahun	9	21,95 %
4	51 - 60 Tahun	7	17,07 %
TOTAL		41	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 11 orang (26,83 %), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 14 orang (34,15%), berumur 41- 50 tahun yaitu sebanyak 9 orang (21,95%) dan berumur 51- 60 tahun yaitu sebanyak 7 orang (17,07 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun pada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli.

4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3
Tingkatan Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D3	4	9,76 %
2	S1	30	73,17 %
3	S2	7	17,07 %
4	S3	0	0 %
TOTAL		41	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang berlatar belakang pendidikan D3 sebanyak 4 orang (9,76 %), pendidikan S1 sebanyak 30 orang (73,17%), dan pendidikan Strata-2 yaitu sebanyak 7 orang (17,07 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berlatar belakang pendidikan Strata-1 pada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli.

4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.4
Lama Bekerja Responden

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 5 Tahun	13	31,71 %
2	5 - 10 Tahun	18	43,90 %
3	> 10 Tahun	10	24,39 %
TOTAL		41	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari karyawan yang lama bekerja < 5 tahun sebanyak 13 orang (31,71 %), lama bekerja 6 - 10 tahun sebanyak 18 orang (43,90%) dan lama lebih dari 10 tahun sebanyak 10 orang (24,39 %). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah karyawan yang berumur rentang waktu dari 5 tahun hingga 10 tahun pada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli.

4.1.3.Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan

opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden

4.1.3.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Skor Angket Untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

No	Jawaban Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	23	56,10	10	24,39	8	19,51	0	0	0	0,00	41	100
2	18	43,90	16	39,02	7	17,07	0	0	0	0,00	41	100
3	16	39,02	14	34,15	11	26,83	0	0	0	0,00	41	100
4	22	53,66	14	34,15	5	12,20	0	0	0	0,00	41	100
5	24	58,54	11	26,83	6	14,63	0	0	0	0,00	41	100
6	20	48,78	11	26,83	10	24,39	0	0	0	0,00	41	100
7	16	39,02	15	36,59	10	24,39	0	0	0	0,00	41	100
8	16	39,02	15	36,59	10	24,39	0	0	0	0,00	41	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah:

1. Jawaban responden Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang (56,10%).
2. Jawaban responden Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (43,90%).

3. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang (39,02%).
4. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang (53,66%).
5. Jawaban responden Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang (58,54%).
6. Jawaban responden Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (48,78%).
7. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang (39,02%).
8. Jawaban responden Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang (39,02%).

4.1.3.2 Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Skor Angket Untuk Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Jawaban Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	18	43,90	18	43,90	5	12,2	0	0	0	0,00	41	100
2	15	36,59	20	48,78	6	14,63	0	0	0	0,00	41	100
3	13	31,71	18	43,90	10	24,39	0	0	0	0,00	41	100
4	19	46,34	17	41,46	5	12,2	0	0	0	0,00	41	100
5	13	31,71	24	58,54	4	9,756	0	0	0	0,00	41	100
6	20	48,78	16	39,02	5	12,2	0	0	0	0,00	41	100
7	21	51,22	12	29,27	8	19,51	0	0	0	0,00	41	100
8	19	46,34	17	41,46	5	12,2	0	0	0	0,00	41	100
9	20	48,78	13	31,71	8	19,51	0	0	0	0,00	41	100
10	15	36,59	20	48,78	6	14,63	0	0	0	0,00	41	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

1. Jawaban responden Penerapan system akuntansi pada SKPD saya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju sebanyak 18 orang (43,90%).
2. Jawaban responden Melakukan analisis transaksi/ identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di SKPD, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (48,78%).
3. Jawaban responden Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di SKPD, mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (43,90%).

4. Jawaban responden Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 19 orang (46,34%).
5. Jawaban responden Pencatatan yang dilakukan pada SKPD saya secara kronologis, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang (58,54%).
6. Jawaban responden Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (48,74%).
7. Jawaban responden Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya di, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang (51,22%).
8. Jawaban responden Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 19 orang (46,34%).
9. Jawaban responden Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD saya dilakukan setiap periode akuntansi, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (48,78%).
10. Jawaban responden Pelaporan laporan keuangan pada SKPD saya dilakukan secara konsisten dan periodik, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 20 orang (48,74%).

4.1.3.4 Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Berdasarkan penyebaran angket kepada pegawai Pemerintah Kota Gunung Sitoli diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Skor Angket Untuk Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

No	Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	20	48,78	11	26,83	10	24,39	0	0,00	0	0,00	41	100
2	20	48,78	16	39,02	5	12,20	0	0,00	0	0,00	41	100
3	22	53,66	13	31,71	6	14,63	0	0,00	0	0,00	41	100
4	15	36,59	17	41,46	9	21,95	0	0,00	0	0,00	41	100
5	25	60,98	12	29,27	4	9,76	0	0,00	0	0,00	41	100
6	18	43,90	16	39,02	7	17,07	0	0,00	0	0,00	41	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Jawaban responden Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspktorat daerah, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (48,78%).
2. Jawaban responden Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang (48,78%).
3. Jawaban responden Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 22 orang (53,66%).
4. Jawaban responden Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 orang (41,46%).

5. Jawaban responden Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan, mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 25 orang (60,98%).
6. Jawaban responden Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang (43,90%).

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

1. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018).

Tabel 4.8
Uji Validitas

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan	
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Y1	0,768	0.3081	Valid
	Y2	0,846	0.3081	Valid
	Y3	0,602	0.3081	Valid
	Y4	0,765	0.3081	Valid
	Y5	0,517	0.3081	Valid
	Y6	0,778	0.3081	Valid
	Y7	0,784	0.3081	Valid
	Y8	0,749	0.3081	Valid
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X1.1	0,753	0.3081	Valid
	X1.2	0,722	0.3081	Valid
	X1.3	0,729	0.3081	Valid
	X1.4	0,775	0.3081	Valid
	X1.5	0,805	0.3081	Valid
	X1.6	0,825	0.3081	Valid
	X1.7	0,733	0.3081	Valid

	X1.8	0,836	0.3081	Valid
	X1.9	0,707	0.3081	Valid
	X1.10	0,681	0.3081	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah	X2.1	0,888	0.3081	Valid
	X2.2	0,869	0.3081	Valid
	X2.3	0,861	0.3081	Valid
	X2.4	0,792	0.3081	Valid
	X2.5	0,728	0.3081	Valid
	X2.6	0,693	0.3081	Valid

1. Nilai validitas untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.3081 maka semua indikator pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah dinyatakan valid.
2. Nilai validitas Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah lebih besar dari nilai r tabel 0.3081 maka semua indikator pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan valid.
3. Nilai validitas Pengelolaan Keuangan Daerah lebih besar dari nilai r tabel 0.3081 maka semua indikator pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- c. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* > 0,6, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).

- d. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Status
1	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,871	Realibilitas Baik
2	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,915	Realibilitas Baik
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,892	Realibilitas Baik

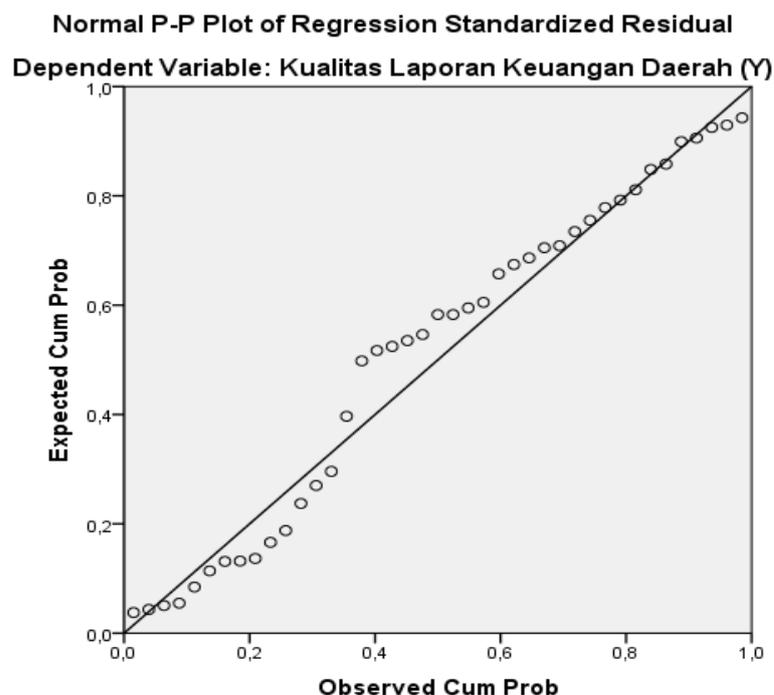
1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,871 > 0,600$ maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah reliabel
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,915 > 0,600$ maka variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah reliabel
3. Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,892 > 0,600$ maka variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah reliabel.

4.1.4 Uji Asumsi

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Juliandi et al., 2018). Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot. Menurut Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas



Gambar. 4.1 Uji Normalitas P Plot

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Uji normalitas ini yang dilakukan dengan menggunakan p-plot diatas, dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilai adalah melihat factor inflasi varian (VIF/ variance inflasi factor), yang tidak melebihi 4 atau 5 (Juliandi et al., 2018).

Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai Faktor Inflasi Varian (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikolinieritas.
2. Bila $VIF < 10$, berarti tidak dapat multikolinieritas.
3. Bila Tolerance $> 0,1$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
4. Bila Tolerance $< 0,1$, maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	1,000	1,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	1,000	1,000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)			

Sumber : Data di olah SPSS 24

Berdasarkan dari tabel diatas, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai Tolerance untuk masing-masing variable adalah sebagai berikut :

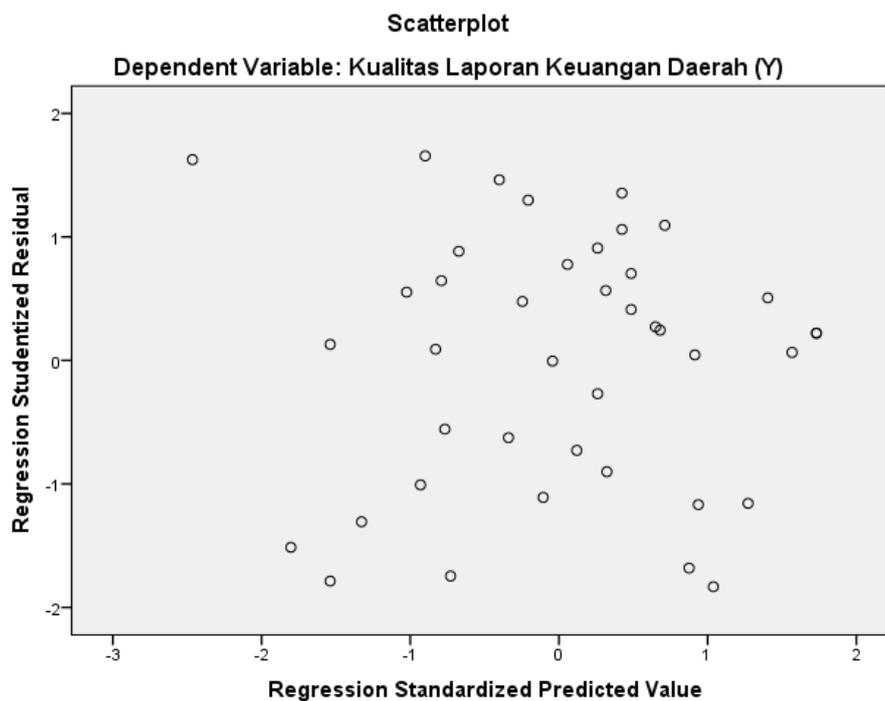
1. Nilai tolerance Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,1000 $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,000 < 10 , maka variable Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan bebas dari Multikolinieritas.
2. Nilai tolerance Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 1,000 $> 0,10$ dan nilai VIF 1,000 < 10 , maka variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bebas dari Multikolinieritas.

4.1.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedasitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedasitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas. Deteksi heterokedasitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan menggunakan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SPRESID (nilai residualnya) (Juliandi et al., 2018).

Dasar kriteria dalam uji heterokedasitas ini adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedasitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas.



Gambar. 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,655 ^a	,430	,400	3,49777	1,984
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)					
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)					

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai durbin watson (D-W) sebesar 1,984 diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1,984 < + 2$). Maka dapat disimpulkan bahwa dari angka durbin watson (D-W) tersebut tidak terjadi autokorelasi.

4.1.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai suatu variable terikat akibat pengaruh dari variable bebas (Juliandi et al., 2014). Berikut ini adalah hasil pengolahan data regresi linier berganda :

Tabel 4.12
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	
1	(Constant)	3,339	1	
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	,484		.538
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	,391		.354

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : Data di olah SPSS 24

Dari tabel diatas diketahui nilai regresi linear bergandanya sebagai berikut

1. Konstanta = 3,339
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah = 0,484
3. Pengelolaan Keuangan Daerah = 0,391

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 3,339 + 0,484 + 0,391$$

Dimana keterangannya adalah :

1. Konstanta sebesar 3.339 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan meningkat sebesar 3.339
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) sebesar 0,484 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh

kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,484 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) sebesar 0,391 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,391 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

4.1.6. Pengujian Hipotesis

4.1.6.1. Uji Signifikan Parsial (Uji –t)

Uji t yang digunakan dalam analisis ini digunakan untuk menilai kapasitas masing-masing variable independen. (Sugiyono, 2019) Penjelasan lain dari uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) memiliki hubungan yang signifikan atau tidak signifikan, baik sebagian maupun independen, terhadap variable dependen (Y).

Adapun metode dalam penentuan t_{table} menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan

$$df=n-k$$

$$df=41-3=38$$

$$t_{table} = 2.02439$$

Dasar pengambilan keputusan uji t (parsial) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .
 - a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, hipotesis diterima maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak H_0).

- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, hipotesis ditolak maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima H_0).
2. Berdasarkan nilai signifikan
- a. Jika nilai sig. $< 0,05$ maka variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat (maka tolak H_0).
- b. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat (maka terima H_0).

Adapun data hasil pengujian yang diperoleh dari SPSS 24 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Uji Secara Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	,561	,578
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	4,682	,000
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	2,539	,015
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)			

Sumber : Data di olah SPSS 24.

1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dimana $t_{hitung} = 4,682$ dan $t_{tabel} = 2.02439$. Didalam hal ini $t_{hitung} 4,682 > t_{tabel} 2.02439$ dan nilai sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya

adalah 0,05, maka nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_a dan H_0 di tolak, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli.

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dimana $t_{hitung} = 2,539$ dan $t_{tabel} = 2.02439$. Didalam hal ini $t_{hitung} 2,539 > t_{tabel} 2.02439$. Dan nilai sig adalah 0,001 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig $0,015 < 0,05$, sehingga H_a dan H_0 di tolak, ini Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli.

4.1.6.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu insentif dan motivasi untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu produktivitas kerja. Uji F juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. (Sugiyono, 2019).

Dasar pengambilan keputusan uji F (Simultan) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai f hitung dan f tabel
 - a. Jika nilai f hitung $>$ f tabel, hipotesis diterima maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak H_0).

- b. Jika nilai f hitung $< f$ tabel hipotesis ditolak maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima H_0).
2. Berdasarkan nilai signifikan
- a. Jika nilai sig. $< 0,05$ maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Tabel 4.14
Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	350,216	2	175,108	14,313	,000 ^b
	Residual	464,906	38	12,234		
	Total	815,122	40			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)						
b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)						

Sumber : Data di olah SPSS 24

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa nilai F adalah 14,313, kemudian nilai sig nya adalah 0,000. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%, uji dua pihak dan $df = n-k$ dan $k-1$

Bedasarkan tabel 4.13 diatas diperoleh F_{hitung} untuk variabel sebesar 14,313 untuk kesalahan 5%.

$$F_{tabel} = df=n \text{ dan } k-1$$

$$= 41-3=38 \text{ dan } 3-1 =2$$

$$F_{tabel} = 3.24$$

Didalam hal ini $F_{hitung} 14,313 > F_{tabel} 3,24$ dengan nilai sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Ini berarti H_a dan H_o di tolak sehingga Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli.

4.1.7. Koefisien Determinansi (R-Square)

Nilai R-Square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai suatu variable terikat dipengaruhi oleh variasi nilai suatu variable bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai kolerasi sebesar -1 atau 1 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variable, sedangkan nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan hubungan antara kedua variable sama sekali tidak sempurna (Sugiyono, 2019).

Berikut adalah hasil pengujian statistiknya :

Tabel 4.15
Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,655 ^a	,430	,400	3,49777	1,984
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)					
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)					

Semakin tinggi nilai R square maka akan semakin baik bagi model regresi, karena berarti kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya juga semakin besar. nilai R-square 0,430 menunjukkan 43,0% variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dipengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sisanya 57,0 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan dimana $t_{hitung} 4,682 > t_{tabel} 2.02439$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_a dan H_0 di tolak, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Ikyarti & Aprilia, 2019)

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar ini syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yakni SAP yang diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, standar akuntansi keuangan ini merupakan faktor penting

yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Rahmawati et al., 2018).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yeni et al., 2020), (Tarigan & Sari, 2021) dan (Gustina, 2021) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

4.2.2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan dimana $t_{hitung} 2,539 > t_{tabel} 2.02439$ dan nilai sig $0,015 < 0,05$, sehingga H_a dan H_0 di tolak, ini Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli.

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan menggunakan 7 (tujuh) komponen dasar, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Sinambela et al., 2018)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana hal-hal tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional (Vidyasari & Suryono, 2021).

Peraturan Menteri Daerah dalam Negeri/Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan baik secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi mempunyai peran penting karena berfungsi dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memiliki kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Husna et al., 2022).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Defitri, 2018) dan (Husna et al., 2022) bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

4.2.3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis telah membuktikan secara simultan dimana F_{hitung} 14.313 > F_{tabel} 3,24 dan nilai sig 0,000 < 0,05. Ini berarti H_a dan H_o di tolak

sehingga Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kota Gunung Sitoli.

Laporan keuangan merupakan sebuah hal yang sensitif dan cukup menarik untuk dibahas pada saat ini, dikarenakan sudah cukup banyak kerugian yang dialami oleh perusahaan swasta maupun pemerintah karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan terkait (Mahfuz & Hanum, 2023)

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Sinambela et al., 2018)

Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar

penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana (Slamet & Irmadiani, 2022)

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Slamet & Irmadiani, 2022) dan (Ikyarti & Aprila, 2019) bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pegawai Kota Gunung Sitoli.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pegawai Kota Gunung Sitoli.

5.2. Saran

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Agar Kota Gunung Sitoli lebih memberikan pengawasan yang ketat atas pengelolaan keuangan yang ada pada Kota Gunung Sitoli
2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah agar lebih ditingkatkan sehingga pelayanan ke masyarakat lebih cepat
3. Peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P., Suarsa, A., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pdam Tirtawening Kota Bandung. *Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi RIVIU*, 1(3), 26–41.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Erganda, I. S., Marota, R., & Ilmiyono, A. F. (2021). Pengaruh Trasparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(2), 1–11.
- Fahmi, I. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan*. CV. Alfabeta.
- Gea, I. R. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 1(1), 84–93.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hanum, Z. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(3), 237–242.
- Husna, A., Maryam, M., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206–214.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. (2020). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis*.
- Mahfuz, R. P., & Hanum, Z. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2895–2904.

Manik, L. F., Sari, E. N., & Irfan, I. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada SMA Swasta Bagian Medan Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 19–29.

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.

Nainggolan, E. P. (2016). Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(8), 171–181.

Permata, N., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 105–117.

Prasetyaningrum, Y. T. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisihan Daerah Jawa Tengah. *EBISTEK: Ekonomika, Bisnis Dan Teknologi*, 4(1), 1–11.

Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Binangkit, I. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 250–260.

Putri, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 1–9.

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.

- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–147.
- Rasdianto, R. (2019). *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*. Salemba Empat,.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–34.
- Saragih, F., & Parlina, A. S. (2021). *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Uta. *Jurnal Manajemen*, 1(2), 129–138.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 67–80.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Grup.
- Tarigan, J. I., & Sari, E. N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 22(2), 175–205.
- Utami, N. P. S., Merta, I. W. G., & Manuaba, I. B. M. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(3), 42–47.

- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–24.
- Yassir, Y., Mursalim, M., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 477–494.
- Yeni, E., Irman, M., & Fadrul, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 1(1), 64–88.

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA
KOTA GUNUNG SITOLI

Kepada Yth. Bapak / Ibu
Pegawai Pemko Gunung Sitoli
Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Rais Halim Harefa (1705170058) mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Rais Halim Harefa

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-----|-----------------------|-----------------|
| a. | SS | : Sangat Setuju | : dengan Skor 5 |
| b. | S | : Setuju | : dengan Skor 4 |
| c. | KS | : Kurang Setuju | : dengan Skor 3 |
| d. | TS | : Tidak Setuju | : dengan Skor 2 |
| e. | STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

B. Identitas Responden

No. Responden :

Umur : (Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SMK D3 S1 S2 S3

Lama Bekerja : <5 Tahun 6-10 tahun > 10 Tahun

1. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Relevan						
1	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
2	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini					
Andal						
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan					
4	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
Dapat Dibandingkan						
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
6	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan					
Dapat Dipahami						
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna					
8	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna					

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Identifikasi Prosedur						
1	Penerapan system akuntansi pada SKPD saya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
2	Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di SKPD					
Menentukan Pihak Pihak Terkait						
3	Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di SKPD					
4	Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti					
Menentukan Dokumen Terkait						
5	Pencatatan yang dilakukan pada SKPD saya secara kronologis					
6	Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi					
Menentukan Jurnal Standar						
7	Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya					
8	Setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi					
Menungakannya dalam langkah teknis						
9	Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD saya dilakukan setiap periode akuntansi					
10	Pelaporan laporan keuangan pada SKPD saya dilakukan secara konsisten dan periodik					

3. Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Transparansi						
1	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspktorat daerah.					

2	Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan					
Akuntabilitas						
3	Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.					
4	Program-program dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					
Value Of Money						
5	Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan					
6	Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja					

TABULASI KUISIONER

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TOTAL
A01	5	5	5	5	4	5	5	5	39
A02	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A03	4	5	5	5	5	5	5	5	39
A04	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A05	4	4	4	4	3	5	3	3	30
A06	5	4	5	4	5	3	4	4	34
A07	5	5	5	5	5	4	4	4	37
A08	3	4	4	5	4	3	5	3	31
A09	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A10	3	3	3	3	3	3	3	3	24
A11	5	5	3	5	5	5	5	4	37
A12	3	3	3	4	5	4	3	3	28
A13	5	4	4	4	5	3	4	5	34
A14	5	5	3	5	5	5	5	5	38
A15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A16	3	3	3	3	3	3	3	3	24
A17	5	4	4	5	5	5	5	5	38
A18	4	4	5	4	3	4	3	5	32
A19	5	5	4	4	3	4	4	3	32
A20	5	4	4	4	4	3	4	4	32
A21	4	4	4	4	4	4	4	5	33
A22	5	4	4	3	4	3	4	4	31
A23	5	5	5	5	3	4	4	4	35
A24	5	4	5	5	4	4	4	4	35
A25	5	5	5	4	5	5	4	4	37
A26	3	3	3	5	5	5	5	5	34
A27	5	5	5	5	4	5	4	5	38
A28	5	5	3	5	5	5	5	4	37
A29	4	4	4	5	4	3	3	3	30
A30	5	4	3	5	5	5	5	5	37
A31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
A32	3	3	3	5	4	4	4	4	30
A33	5	5	4	4	5	5	5	5	38
A34	3	3	3	3	5	3	3	3	26
A35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
A36	4	4	4	4	4	4	3	4	31
A37	3	3	3	3	5	3	3	3	26
A38	5	5	5	5	5	5	3	4	37
A39	4	4	4	4	5	5	4	4	34

A36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
A37	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	41
A38	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	42
A39	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
A40	5	5	3	4	4	4	3	4	3	3	38
A41	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	47

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	5	5	5	5	5	5	30
A03	5	5	5	5	5	5	30
A04	5	5	5	5	5	5	30
A05	5	5	5	5	5	5	30
A06	5	5	5	5	5	5	30
A07	5	5	5	5	5	5	30
A08	4	4	4	4	5	5	26
A09	5	5	5	5	5	5	30
A10	5	5	5	5	5	5	30
A11	5	5	5	4	5	4	28
A12	3	4	3	4	4	3	21
A13	5	4	5	5	5	5	29
A14	5	5	5	5	5	5	30
A15	5	5	5	5	5	5	30
A16	5	5	5	3	5	5	28
A17	4	4	4	4	5	4	25
A18	4	4	4	3	4	4	23
A19	4	4	4	4	4	4	24
A20	5	5	5	5	5	3	28
A21	4	4	4	4	4	4	24
A22	4	4	4	3	4	4	23
A23	3	3	3	3	4	4	20
A24	3	3	3	3	3	3	18
A25	4	4	4	4	5	5	26
A26	5	5	5	4	4	4	27
A27	5	5	5	5	5	3	28
A28	5	5	5	4	5	4	28
A29	5	5	5	3	4	4	26
A30	5	5	5	5	3	4	27
A31	4	4	4	4	5	5	26

A32	3	3	3	3	5	4	21
A33	3	4	3	4	5	5	24
A34	4	4	4	4	5	4	25
A35	3	4	4	4	4	4	23
A36	3	4	5	4	5	5	26
A37	3	3	3	3	3	3	18
A38	3	3	4	4	3	3	20
A39	4	4	4	4	4	4	24
A40	4	4	4	4	4	4	24
A41	3	5	5	3	4	3	23